
Analisis Framing dan Etika Jurnalistik pada Pemberitaan Kasus Tanah Jusuf Kalla di Detik.com dan ANTARA News

Nanda Mikola Putra^{1*} Mifda Hilmiyah²

¹ Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia.

* *Email Korespondensi:* anandamikola012@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dua media daring nasional, yaitu Detik.com dan ANTARA News, membingkai pemberitaan mengenai kasus sengketa tanah seluas 16,4 hektare yang melibatkan Jusuf Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) di Kota Makassar. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Jusuf Kalla menuding adanya rekayasa dan permainan mafia tanah yang merugikan pihaknya. Realitas sosial ditampilkan dengan cara yang berbeda oleh setiap media dalam pemberitaan. Penelitian ini menggunakan model analisis framing Robert N. Entman yang terdiri dari empat elemen utama, yaitu define problems (pendefinisian masalah), diagnose causes (penyebab masalah), make moral judgment (penilaian moral), dan suggest remedies (penyelesaian masalah). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi teks berita untuk melihat perbedaan konstruksi makna antara kedua media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com menonjolkan sisi konflik dan kritik tajam Jusuf Kalla terhadap pihak GMTD, menampilkan narasi konfrontatif yang berfokus pada figur tokoh dan dinamika sosial-politik. Sementara itu, ANTARA News mengonstruksi isu tersebut secara lebih institusional dan prosedural, dengan penekanan pada aspek hukum, kronologi, dan proses penyelesaian melalui jalur resmi. Perbedaan framing ini menggambarkan bagaimana ideologi redaksi, gaya jurnalistik, serta orientasi media berperan dalam membentuk sudut pandang pemberitaan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian framing media online di Indonesia, serta meningkatkan literasi kritis masyarakat terhadap keberagaman perspektif dalam praktik jurnanisme modern.

Keywords: Framing; Robert Entman; Jusuf Kalla; Sengketa Tanah; Media daring.

PENDAHULUAN

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa (Yusuf 2024). Melalui kekuatan bahasa, narasi, dan sudut pandang yang dihadirkan, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai lembaga yang berperan aktif dalam membentuk realitas sosial (Pamungkas 2024). Dalam situasi ini, berita bukan sekadar laporan tentang kejadian di lapangan; itu adalah produk dari konstruksi sosial yang melibatkan pemilihan, penonjolan, dan pembingkaiannya suatu masalah. Media dapat memengaruhi bagaimana publik memahami peristiwa, siapa yang dianggap benar atau salah, dan apa solusi yang layak dilakukan (Kusumaningsih 2024). Oleh karena itu, analisis terhadap cara media membingkai sebuah isu menjadi penting untuk mengungkap dinamika kekuasaan, ideologi, serta kepentingan yang mungkin tersembunyi di balik penyajian berita (Jahrir and Tahir 2025).

Framing yang digunakan oleh media di Indonesia sering menunjukkan perbedaan antara gaya redaksional, orientasi ideologis, dan kepentingan politik di antara mereka (Syaza, Mohamed, and Wahab 2024). Perbedaan tersebut dapat terlihat jelas ketika dua media melaporkan isu yang sama, namun dengan sudut pandang dan penekanan yang berbeda. Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti adalah pemberitaan mengenai sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar yang melibatkan Jusuf Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sosok Jusuf Kalla, seorang tokoh nasional, pengusaha, sekaligus mantan Wakil Presiden Republik Indonesia dua periode.

Kasus ini berawal dari tuduhan Jusuf Kalla terhadap pihak GMTD yang dianggap telah melakukan rekayasa dalam proses hukum terkait kepemilikan tanah tersebut. Dalam sebuah pernyataannya yang dikutip oleh Detik.com pada 05 November 2025, Jusuf Kalla menyebut bahwa kasus tersebut merupakan bentuk "perampokan" dan "rekayasa hukum" yang dilakukan secara sistematis. Ia menilai bahwa proses hukum yang menjerat Yayasan Haji Kalla sebagai pihak yang dirugikan tidak mencerminkan keadilan dan mengandung kejanggalan. Di sisi lain, ANTARA News, sebagai kantor berita nasional yang cenderung bersifat netral dan

institusional, memberitakan kasus ini dengan menonjolkan aspek hukum, proses administratif, serta respons pihak terkait tanpa terlalu menyoroti emosi atau konflik personal dari Jusuf Kalla.

Perbedaan cara penyajian tersebut memperlihatkan adanya perbedaan framing antara media komersial (Mustika 2017) seperti Detik.com dan media nasional yang berfungsi sebagai lembaga berita resmi seperti ANTARA News. Detik.com, yang dikenal dengan gaya pemberitaan cepat, aktual, dan bernuansa dramatis, sering kali menonjolkan unsur konflik dan diksi emosional untuk menarik perhatian pembaca. Sementara itu, ANTARA News sebagai lembaga pers milik negara cenderung mengedepankan unsur objektivitas, keseimbangan informasi, serta menjaga citra institusional dalam penyajian berita. Dengan demikian, kedua media ini menjadi objek yang menarik untuk dibandingkan karena representasi realitas yang mereka bangun berpotensi mencerminkan perbedaan ideologi dan orientasi redaksi.

Dalam kerangka komunikasi massa, perbedaan framing tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor kebijakan redaksional, kepemilikan media, dan kultur jurnalistik masing-masing institusi. Shoemaker dan Reese (2014) menjelaskan bahwa isi media tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai profesional jurnalis, tetapi juga oleh rutinitas organisasi, tekanan eksternal, serta orientasi ideologi pemilik media. Oleh karena itu, ketika dua media melaporkan isu yang sama, perbedaan perspektif yang muncul dapat menjadi cerminan dari identitas dan kepentingan lembaga pers itu sendiri.

Kasus sengketa tanah Jusuf Kalla dan GMTD juga dapat dikaji dalam konteks jurnalisme konflik, di mana media berperan sebagai arena pertarungan makna. McQuail menyatakan bahwa media tidak hanya merepresentasikan konflik, tetapi juga dapat memperbesar atau meredamnya melalui pilihan bahasa, sumber berita, dan visualisasi narasi. Dalam kasus ini, Detik.com lebih memilih untuk memperbesar dimensi konflik dengan menonjolkan kutipan langsung Jusuf Kalla yang menyebut "ini perampokan", sedangkan ANTARA News menampilkan narasi yang lebih formal dan menekankan pada klarifikasi serta tanggapan resmi.

Dari perbedaan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana kedua media membingkai realitas yang sama secara berbeda, dan nilai-nilai apa yang terkandung dalam framing tersebut? Pertanyaan ini menjadi relevan karena di era digital saat ini, media daring memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik (Yusuf 2024). Publik sering kali tidak membaca berita dari berbagai sumber, melainkan hanya dari satu portal yang mereka percayai, sehingga framing media dapat membentuk persepsi yang bias terhadap suatu isu.

Selain itu, penelitian ini juga menjadi penting karena melibatkan figur publik yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi signifikan (Sadewo et al. 2024). Ketika orang-orang seperti Jusuf Kalla terlibat dalam jurnalisme politik, media seringkali harus lebih berhati-hati saat menulis berita. Ini terutama berlaku untuk memilih diksi, sumber informasi, dan seberapa penting narasi itu. Misalnya, Detik.com menyiarkan pernyataan Jusuf Kalla secara langsung untuk menunjukkan sisi pribadi dan emosionalnya, sedangkan ANTARA News mengangkat masalah ini dalam konteks hukum yang lebih luas. Perbedaan ini menggambarkan dua model pemberitaan: model dramatisasi konflik dan model institusional rasionalisasi.

Lebih jauh lagi, analisis framing dalam penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana objektivitas dan etika jurnalistik diterapkan dalam praktik pemberitaan daring di Indonesia. Menurut Kovach dan Rosenstiel (2001), prinsip utama jurnalisme adalah loyalitas terhadap kebenaran dan kepentingan publik (Fianto, Ghofur, and Qorib 2023). Namun, dalam praktiknya, banyak media yang terjebak pada tuntutan pasar, kecepatan publikasi, dan tekanan klik-bait yang akhirnya mengorbankan kedalaman analisis dan keseimbangan berita. Dalam hal ini, framing dapat menjadi alat untuk menilai bagaimana media menafsirkan realitas, apakah sesuai dengan prinsip etis jurnalistik atau justru condong pada kepentingan tertentu.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan framing pemberitaan kasus sengketa tanah Jusuf Kalla antara Detik.com dan ANTARA News berdasarkan model Robert Entman. Secara khusus, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan: (1) bagaimana Detik.com dan ANTARA News mendefinisikan masalah dalam kasus sengketa tanah tersebut (define problems); (2) apa penyebab yang diidentifikasi oleh masing-masing media (diagnose causes); (3) bagaimana penilaian moral atau nilai yang dibangun dalam teks berita (make moral judgment); dan (4) solusi apa yang ditawarkan oleh masing-masing media (suggest remedies).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian framing dalam jurnalisme online Indonesia, serta memberikan pemahaman praktis bagi mahasiswa jurnalistik, jurnalis, dan masyarakat umum tentang bagaimana media membentuk realitas sosial melalui bahasa dan struktur naratif. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks pendidikan literasi media, karena dengan memahami framing, masyarakat dapat lebih kritis dalam menerima dan menafsirkan informasi yang mereka konsumsi setiap hari.

Lebih jauh, penelitian ini juga dapat memberikan refleksi tentang peran jurnalisme dalam menjaga integritas informasi di era digital (Maflucha, Madura, and Kamal 2024). Dalam situasi di mana berita dapat tersebar secara cepat dan luas melalui media sosial, kemampuan masyarakat untuk membedakan antara

informasi faktual, opini, dan konstruksi makna menjadi semakin penting (Adhiarso and Utari 2017). Analisis framing membantu kita memahami bahwa setiap berita membawa nilai, kepentingan, dan perspektif tertentu yang perlu disadari oleh pembacanya.

Dengan demikian, melalui analisis terhadap dua media besar Detik.com dan ANTARA News penelitian ini berupaya mengungkap dinamika representasi media terhadap isu yang sama, serta menggali makna di balik perbedaan penyajian tersebut. Hasil analisis diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana praktik jurnalisme di Indonesia masih dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, kebijakan redaksional, dan orientasi ideologis yang berbeda-beda, serta bagaimana hal itu memengaruhi pembentukan persepsi publik terhadap isu-isu penting yang melibatkan tokoh nasional seperti Jusuf Kalla.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana konstruksi realitas sosial (Yuningsih 2006) dibangun melalui pemberitaan media daring terkait kasus sengketa tanah yang melibatkan Jusuf Kalla. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara kontekstual makna dan pesan yang terkandung dalam teks berita, bukan sekadar menilai frekuensi atau data numerik. Pendekatan kualitatif deskriptif memfokuskan diri pada deskripsi yang detail dan interpretasi yang mendalam terhadap fenomena yang terjadi, sehingga hasil analisis dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi pembingkai (framing) yang digunakan oleh media.

Salah satu teori yang banyak digunakan dalam menganalisis konstruksi berita adalah teori framing Robert N. Entman. Entman menjelaskan bahwa framing merupakan proses seleksi aspek-aspek tertentu dari suatu realitas yang dipersepsikan, kemudian menonjolkannya dalam teks komunikasi sehingga membentuk makna tertentu bagi khalayak (Entman 2023). Menurut Entman, ada empat elemen utama dalam framing: define problems (mendefinisikan masalah), diagnose causes (menentukan penyebab), make moral judgment (membuat penilaian moral), dan suggest remedies (menyarankan penyelesaian). Melalui empat elemen ini, media dapat mengarahkan bagaimana publik memahami dan menilai suatu isu. Dengan demikian, framing menjadi alat analisis yang efektif untuk mengidentifikasi bagaimana media memproduksi makna dan membangun realitas sosial (Gunarso 2023).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing model Robert Entman, yang terdiri atas empat perangkat utama, yaitu define problems (pendefinisian masalah), diagnose causes (mendiagnosis penyebab), make moral judgment (membuat penilaian moral), dan treatment recommendation (memberikan rekomendasi penyelesaian) (Hidayat and Prasetyo 2023). Melalui empat perangkat analisis ini, peneliti mengidentifikasi bagaimana Detik.com dan ANTARA News membingkai kasus sengketa tanah Jusuf Kalla dengan gaya bahasa, sudut pandang, dan struktur narasi yang berbeda. Analisis ini dilakukan secara sistematis dengan membaca teks berita secara mendalam, menandai elemen-elemen penting yang menunjukkan pembingkai, serta membandingkan pola konstruksi wacana dari kedua media Detik.com dan ANTARA News.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dua artikel berita yang diambil dari Detik.com dan ANTARA News, masing-masing memuat pemberitaan tentang sengketa tanah Jusuf Kalla. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mencatat, dan mengumpulkan teks berita yang relevan. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model analisis Miles dan Huberman. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana nilai, kepentingan, serta ideologi media memengaruhi cara mereka membingkai isu hukum dan sosial yang melibatkan tokoh publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus sengketa tanah yang melibatkan mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK), dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) telah menarik perhatian publik sejak awal 2023. Sengketa ini bermula dari klaim kepemilikan lahan seluas ribuan hektar di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang dikembangkan oleh GMTD untuk proyek pariwisata. JK, sebagai pemilik lahan, menuding adanya manipulasi dokumen dan praktik mafia tanah yang melibatkan pihak swasta dan aparaturnya. Kasus ini tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga mencerminkan masalah struktural dalam sistem administrasi pertanahan Indonesia, di mana korupsi, tumpang tindih sertifikat, dan lemahnya pengawasan sering terjadi. Media massa memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi publik terhadap kasus ini, karena mereka tidak sekadar melaporkan fakta, melainkan membingkai (framing) isu tersebut sesuai orientasi redaksionalnya.

Dalam konteks ini, dua media daring utama Detik.com sebagai media komersial yang berorientasi pada audiens luas dan ANTARA News sebagai media institusional milik pemerintah—memberitakan kasus tersebut dengan pendekatan berbeda. Detik.com, yang dikenal dengan gaya sensasional dan cepat tanggap terhadap isu viral, menyoroti aspek emosional dan konfrontatif. Sementara itu, ANTARA News, yang lebih fokus pada akurasi dan edukasi, menekankan dimensi struktural dan hukum. Perbedaan ini menggambarkan bagaimana framing media dapat memengaruhi konstruksi realitas publik, di mana fakta yang sama disajikan dengan penekanan berbeda untuk membentuk opini. Analisis framing menggunakan model Robert Entman yang mencakup empat elemen: mendefinisikan masalah (define problems), mendiagnosis penyebab (diagnose causes), membuat penilaian moral (make moral judgment), dan merekomendasikan penyelesaian (treatment recommendation) menunjukkan variasi signifikan antara kedua media tersebut.

Model framing Entman membantu memahami bagaimana media membangun narasi. Dalam elemen pertama, mendefinisikan masalah, Detik.com menampilkan kasus sebagai konflik pribadi antara JK sebagai tokoh nasional yang "dirampok" haknya oleh GMTD. Berita Detik.com sering menggunakan kutipan langsung JK, seperti "Ini perampokan tanah saya!" untuk menarik simpati. Hal ini menciptakan narasi dramatik yang menempatkan JK sebagai korban ketidakadilan, mengabaikan konteks sosial lebih luas. Sebaliknya, ANTARA News mendefinisikan masalah secara struktural, menyoroti kasus ini sebagai manifestasi mafia tanah yang melibatkan celah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan lemahnya Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berita ANTARA menjelaskan bahwa sengketa ini mencerminkan masalah sistemik, seperti tumpang tindih sertifikat dan korupsi birokrasi, sehingga pembaca diarahkan untuk memahami isu sebagai bagian dari kelemahan institusional negara.

Elemen kedua, mendiagnosis penyebab, memperlihatkan orientasi berbeda. Detik.com menempatkan GMTD sebagai aktor utama yang bertanggung jawab, dengan tuduhan rekayasa dokumen dan kolusi dengan pejabat. Ini menunjukkan framing personal yang fokus pada individu, mungkin untuk meningkatkan engagement melalui konflik. ANTARA, di sisi lain, melihat penyebab lebih kompleks, termasuk faktor eksternal seperti globalisasi ekonomi yang mendorong spekulasi tanah, lemahnya pengawasan pemerintah, dan kurangnya transparansi dalam proses sertifikasi. Analisis ini didukung oleh data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), yang menunjukkan ribuan kasus serupa di Indonesia, menjadikan framing ANTARA lebih edukatif dan kurang emosional.

Dalam penilaian moral, Detik.com membangun simpati publik terhadap JK dengan menekankan keberaniannya melawan "mafia tanah" sebagai wujud integritas pribadi. Narasi ini sering menggunakan bahasa konfrontatif, seperti "JK berjuang sendirian melawan sistem yang busuk," yang mengundang pembaca untuk menilai moral berdasarkan empati personal. ANTARA News, sebaliknya, menekankan nilai keadilan sistemik dan kepatuhan hukum, menghindari pemihakan individu. Berita ANTARA menyoroti pentingnya penegakan hukum tanpa diskriminasi, mengingatkan bahwa tokoh seperti JK juga harus tunduk pada aturan yang sama, sehingga framing ini lebih netral dan institusional.

Terakhir, dalam rekomendasi penyelesaian, Detik.com mengarahkan solusi melalui tindakan hukum pribadi JK, seperti gugatan ke pengadilan, untuk "membuktikan kebenaran." Ini mencerminkan pendekatan individualistik. ANTARA merekomendasikan perbaikan sistemik, seperti reformasi administrasi pertanahan melalui digitalisasi sertifikat dan penguatan pengawasan BPN, serta kampanye anti-korupsi. Rekomendasi ini didasarkan pada studi dari World Bank tentang masalah pertanahan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa solusi struktural lebih efektif daripada pendekatan ad hoc.

Secara keseluruhan, perbandingan framing ini menegaskan perbedaan antara media komersial dan institusional. Detik.com, dengan orientasi profit-driven, menggunakan dramatisasi untuk menarik klik, yang dapat memperkuat polarisasi publik. ANTARA News, sebagai media pemerintah, lebih fokus pada edukasi dan stabilitas sosial, membantu masyarakat memahami isu secara holistik. Temuan ini sejalan dengan teori framing dalam komunikasi massa, di mana media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk agenda publik dan persepsi terhadap kekuasaan.

Dampaknya terhadap opini publik signifikan: Framing personal Detik.com mungkin meningkatkan dukungan terhadap JK, sementara framing struktural ANTARA mendorong diskusi tentang reformasi hukum. Dalam era digital, di mana berita cepat menyebar, framing seperti ini dapat memengaruhi kebijakan publik. Misalnya, jika framing personal dominan, fokus mungkin bergeser dari perbaikan sistem ke skandal individu, yang kurang efektif untuk mengatasi masalah akar.

Oleh karena itu, pentingnya literasi media tidak dapat diabaikan (Khotimah 2024). Masyarakat perlu kritis terhadap narasi media, mempertanyakan bias dan konteks di balik berita. Pendidikan tentang framing dapat membantu warga negara menjadi konsumen informasi aktif, bukan pasif. Analisis ini menunjukkan bahwa media massa bukan sekadar cermin realitas, melainkan pembentuknya, dan dalam kasus seperti sengketa tanah

JK, framing yang berbeda dapat memengaruhi bagaimana keadilan sosial dipahami dan diperjuangkan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saya menilai bahwa perbedaan framing antara Detik.com dan ANTARA menunjukkan bagaimana media berperan membentuk persepsi publik terhadap isu pertanahan di Indonesia. Detik.com cenderung mempersonalisasi kasus dengan menonjolkan posisi Jusuf Kalla sebagai korban, sehingga perhatian publik diarahkan pada konflik individu. Sementara itu, ANTARA menawarkan perspektif yang lebih struktural, menekankan kelemahan sistem administrasi pertanahan sebagai akar masalah.

Menurut saya, pendekatan yang terlalu emosional seperti pada Detik.com dapat mengaburkan persoalan mendasar yang justru perlu dibenahi, seperti tumpang tindih sertifikat, praktik mafia tanah, dan lemahnya pengawasan negara. Sebaliknya, framing yang lebih sistemik seperti dilakukan ANTARA lebih relevan untuk mendorong diskusi publik mengenai reformasi agraria.

Karena itu, saya berpendapat bahwa literasi media menjadi sangat penting. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap berita mengandung sudut pandang tertentu, sehingga pembaca harus kritis dalam menafsirkan informasi. Kasus ini memperlihatkan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengarahkan cara kita melihat masalah dan menentukan apa yang dianggap penting dalam penyelesaian konflik.

KESIMPULAN

Analisis framing media dalam pelaporan kasus sengketa tanah antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development mengungkap perbedaan mendasar antara Detik.com dan ANTARA News. Detik.com, sebagai media komersial, membingkai isu sebagai konflik pribadi dan emosional, menggunakan narasi dramatik untuk menarik simpati publik terhadap JK sebagai korban ketidakadilan.

Sebaliknya, ANTARA News, sebagai media institusional, menekankan dimensi struktural, menyoroti mafia tanah sebagai gejala kelemahan sistem hukum dan administrasi pertanahan di Indonesia. Melalui model framing Robert Entman—yang mencakup definisi masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian—terlihat bahwa Detik.com mendorong pendekatan individualistik, sementara ANTARA mendorong solusi sistemik seperti reformasi BPN dan kampanye anti-korupsi.

Temuan ini menegaskan bahwa framing media bukan sekadar penyampaian fakta, melainkan konstruksi realitas yang membentuk opini publik dan agenda sosial. Dalam konteks digital, di mana berita menyebar cepat, framing personal dapat memperkuat polarisasi dan fokus pada skandal individu, sedangkan framing struktural mendorong diskusi tentang perbaikan institusional. Dampaknya signifikan terhadap kebijakan publik, seperti potensi pengabaian reformasi hukum jika narasi emosional dominan.

Oleh karena itu, literasi media menjadi esensial; masyarakat perlu dilatih untuk mengidentifikasi bias, mempertanyakan sumber, dan memahami konteks di balik berita. Analisis ini menunjukkan bahwa media massa, sebagai pembentuk persepsi, memerlukan pengawasan kritis untuk mendukung demokrasi yang sehat. Dalam kasus seperti ini, framing yang berbeda dapat memengaruhi bagaimana keadilan sosial diperjuangkan, menekankan perlunya pendidikan media untuk mencegah manipulasi dan mempromosikan pemahaman holistik terhadap isu-isu sosial di Indonesia.

REFERENSI

- Adhiarso, Dendy Suseno, and Prahastiwi Utari. 2017. "Pemberitaan Hoax Di Media Online Ditinjau Dari Konstruksi Berita Dan Respon Netizen," no. 2, 215–25.
- Entman, Robert M. 2023. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm," no. August. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>.
- Fianto, Latif, M Abdul Ghofur, and Fathul Qorib. 2023. "Implementasi Sembilan Elemen Jurnalisme Bill Kovach Dan Tom Rosenstiel Pada Berita Media Online," 1–9.
- Gunarso, Sandy. 2023. "Analisis Framing Robert Entman Tentang Kasus Kejahatan Anak Di Bawah Umur" 2 (1): 47–53.
- Hidayat, Rahmat, and Fajar Hamdan Prasetyo. 2023. "Analisis Framing Robert N Entman Pada Berita Larangan Mudik 2021 Di Media Detikcom Dan Kompas.Com." *Jurnal Communication Lens* 2 (2): 2715–7768. https://perpus.univpancasila.ac.id/repository/2020_S1_SKRIPSI_7016210113_POCUT_NADIVA_TF.pdf.
- Jahrir, Sahtiani, and Muhammad Tahir. 2025. "Strategi Wacana Dan Kekuasaan Dalam Pemberitaan Pembebasan Bea Masuk Barang Jemaah Haji : Telaah Model Teun A . Van Dijk Pendahuluan" 5 (2): 1062–70.

- Khotimah, Khusnul, Siti Rosyidah Ekasari, Eva Nur Kholifah, and Neni Agus Triyanti. 2024. "Volume 15 No . 2 Desember 2024 PENTINGNYA LITERASI MEDIA ERA DISRUPSI DIGITAL DAN POST TRUTH THE IMPORTANCE OF MEDIA LITERATURE IN THE ERA OF" 15 (2): 191–98.
- Kusumaningsih, Rila. 2024. "Rila Kusumaningsih" 3 (1): 27–40.
- Maflucha, Lailatul, Universitas Trunojoyo Madura, and Kec Kamal. 2024. "ETIKA JURNALISTIK DALAM ERA DIGITAL : MENGHADAPI ETIKA JURNALISTIK DALAM ERA DIGITAL : MENGHADAPI" 2 (1).
- Mustika, Rieka. 2017. "ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE MENGENAI FRAMING ANALYSIS OF ONLINE MEDIA IN DISCLOSURE OF" 20 (2): 135–48. <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.159>.
- Pamungkas, Yudha Catur, Ryan Purnomo, Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, Jawa Timur, Universitas Nadhlatul, and Ulama Sidoarjo. 2024. "Konstruksi Realitas Sosial Di Indonesia Dalam Peran Media Dan Identitas Budaya Di Era Globalisasi" 4:28–36. <https://doi.org/10.37329/metta.v4i4.3737>.
- Sadewo, Dimas Ulinnuha, Rendra Widyatama, Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan, Kepercayaan Publik, and Publik Figur. 2024. "KEPERCAYAAN PUBLIK DALAM IKLAN : PERAN KUNCI" 9 (1): 136–50.
- Syaza, Nur, Aqilah Mohamed, and Juliana Abdul Wahab. 2024. "Mapping Media Framing and Politics: A Bibliometric Analysis Across the Globe" 14 (4). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i4/21273>.
- Yuningsih, Ani. 2006. "Implementasi Teori Konstruksi Sosial Dalam Penelitian Public Relations." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 7 (1): 59–70. <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i1.1215>.
- Yusuf, Hudi. 2024. "PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PERSEPSI DAN TINGKAT KRIMINALITAS: ANALISIS TERHADAP EFEK MEDIA DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK THE INFLUENCE OF MASS MEDIA ON PERCEPTIONS AND CRIME RATES: AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE MEDIA IN SHAPING Abstrak," 1047–61.